

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam membatasi manajemen laba tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik spesifik tiap mekanisme dan konteks industri *healthcare* yang diteliti.

Mekanisme pengawasan yang bersifat individual dan berbasis karakteristik personal, yaitu komisaris independen dan keberagaman gender direksi, terbukti belum mampu menekan manajemen laba secara signifikan. Temuan ini konsisten pada dua pendekatan pengukuran manajemen laba yang berbeda (lihat hasil uji *robustness* pada bagian 4.2.8), sehingga mengindikasikan bahwa keberadaan kedua mekanisme tersebut pada perusahaan sektor *healthcare* cenderung bersifat formalitas struktural untuk memenuhi ketentuan regulasi, ketimbang benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan substantif.

Sebaliknya, mekanisme pengawasan yang bersifat kolektif dan institusional, yaitu ukuran komite audit, terbukti berperan signifikan dalam menekan manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan pada sektor *healthcare* yang memiliki kompleksitas operasional tinggi lebih ditentukan oleh

kapasitas kolektif suatu organ pengawas, dibandingkan oleh karakteristik individual anggotanya semata.

Peran *audit tenure* sebagai variabel moderasi juga menunjukkan pola yang selektif, yaitu hanya signifikan pada hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan manajemen laba, dengan arah yang justru memperkuat (bukan memperlemah) hubungan tersebut. Pola ini mengindikasikan bahwa *audit tenure* tidak bekerja secara seragam sebagai faktor pelemah pengawasan pada seluruh mekanisme tata kelola, melainkan pengaruhnya bersifat kontekstual dan hanya relevan pada mekanisme yang secara langsung berinteraksi dengan proses audit eksternal, yaitu komite audit yang memiliki keahlian keuangan.

5.2. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori agensi dengan menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme pengawasan berkontribusi secara setara dalam menekan biaya keagenan. Teori agensi berasumsi bahwa keberadaan mekanisme pengawasan akan menurunkan *monitoring cost* dan membatasi perilaku oportunistik manajer. Namun, penelitian ini memberikan nuansa tambahan terhadap asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas penurunan biaya keagenan sangat bergantung pada apakah mekanisme pengawasan bersifat kolektif-institusional (seperti ukuran komite audit, yang terbukti efektif) atau individual-personal (seperti komisaris independen dan keberagaman gender direksi, yang tidak terbukti efektif pada konteks penelitian ini).

Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *audit tenure* dalam kerangka teori agensi. Alih-alih berperan seragam sebagai faktor yang secara umum melemahkan seluruh mekanisme pengawasan akibat menurunnya independensi auditor, *audit tenure* dalam penelitian ini terbukti bekerja secara selektif dan bahkan memperkuat hubungan pada satu mekanisme tertentu (keahlian keuangan komite audit). Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan panjang antara auditor dan klien tidak selalu berimplikasi negatif terhadap independensi, melainkan dapat pula mencerminkan akumulasi pemahaman auditor terhadap kondisi spesifik perusahaan (*client-specific knowledge*), yang berinteraksi dengan keahlian internal komite audit dengan cara yang lebih kompleks daripada yang diasumsikan teori agensi secara konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa perluasan (*extension*) teori agensi pada konteks interaksi antara mekanisme pengawasan internal dan eksternal perusahaan, khususnya pada sektor dengan tingkat regulasi tinggi seperti *healthcare*.

2. Implikasi Praktis

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketentuan formal mengenai proporsi minimum komisaris independen (30% sesuai POJK Nomor 33/POJK.04/2014) belum cukup untuk menjamin efektivitas pengawasan terhadap manajemen laba. OJK perlu mempertimbangkan penguatan aspek kualitatif komisaris independen, misalnya melalui persyaratan kompetensi atau evaluasi kinerja berkala, bukan sekadar pemenuhan kuota proporsi.

Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), temuan mengenai efektivitas ukuran komite audit dapat menjadi masukan untuk mendorong perusahaan sektor *healthcare* mempertahankan atau meningkatkan jumlah anggota komite audit di atas batas minimum regulasi (3 orang), mengingat karakteristik operasional sektor ini yang kompleks memerlukan kapasitas pengawasan kolektif yang memadai.

Bagi Dewan Komisaris, khususnya komisaris independen, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bahwa keberadaan struktural semata tidak cukup; diperlukan penguatan fungsi pengawasan secara substantif, misalnya melalui peningkatan frekuensi rapat pengawasan atau akses informasi yang lebih luas terhadap kebijakan akuntansi perusahaan.

Bagi Komite Audit, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan tambahan ketika perusahaan memiliki hubungan audit yang panjang dengan Kantor Akuntan Publik yang sama, khususnya dalam mengevaluasi kembali independensi proses audit meskipun komite audit memiliki keahlian keuangan yang memadai.

Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), temuan mengenai peran *audit tenure* yang memperkuat (bukan memperlemah) hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan manajemen laba perlu menjadi perhatian khusus. KAP disarankan menerapkan mekanisme rotasi partner audit secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan skeptisisme profesional khususnya pada perikatan audit jangka panjang, agar akumulasi pemahaman terhadap klien tidak berubah menjadi kompromi terhadap independensi.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh sektor industri yang memiliki karakteristik tata kelola perusahaan yang berbeda.

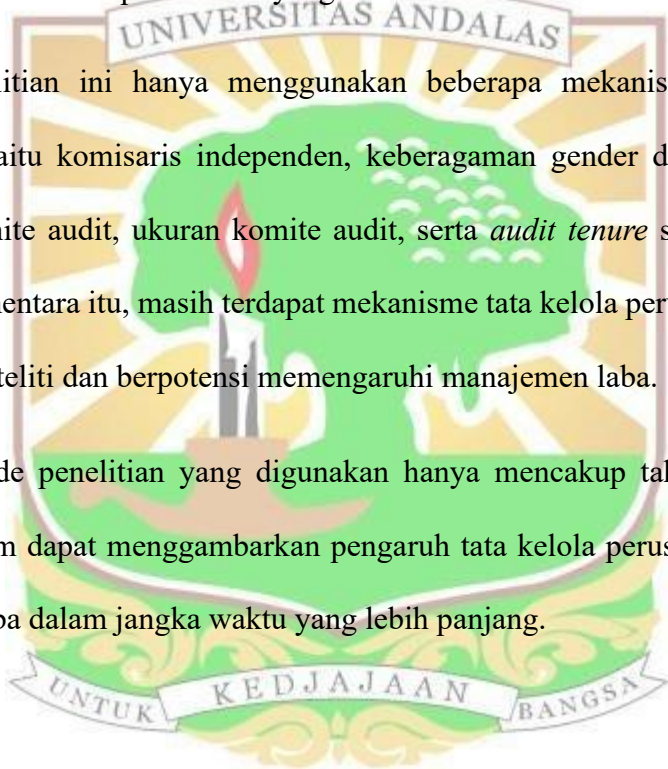
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu komitisaris independen, keberagaman gender direksi, keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, serta *audit tenure* sebagai variabel moderasi. Sementara itu, masih terdapat mekanisme tata kelola perusahaan lainnya yang belum diteliti dan berpotensi memengaruhi manajemen laba.

3. Periode penelitian yang digunakan hanya mencakup tahun 2020–2024 sehingga belum dapat menggambarkan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dalam jangka waktu yang lebih panjang.

5.4. Saran

1. Saran Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan literatur mengenai tata kelola perusahaan, *audit tenure*, dan manajemen laba, khususnya pada perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam perspektif teori agensi terkait



efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam membatasi praktik manajemen laba.

2. Saran Praktis

Perusahaan sektor *healthcare* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perusahaan, khususnya melalui komite audit, guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan meminimalkan praktik manajemen laba. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga independensi auditor eksternal agar kualitas audit tetap terjaga meskipun auditor memiliki masa penugasan yang relatif panjang.

3. Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan beberapa arah pengembangan berikut. Pertama, memasukkan variabel pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai variabel independen maupun moderasi, mengingat sektor *healthcare* semakin dituntut untuk transparan dalam aspek keberlanjutan. Kedua, menambahkan variabel kualitas audit (misalnya ukuran KAP *Big Four* atau spesialisasi auditor industri) untuk melengkapi peran *audit tenure* yang telah diuji dalam penelitian ini. Ketiga, mempertimbangkan struktur kepemilikan institusional (*institutional ownership*) sebagai variabel kontrol atau moderasi tambahan, mengingat kepemilikan institusional dapat memengaruhi tekanan pengawasan eksternal terhadap manajemen. Keempat, menggunakan pendekatan *dynamic panel data*, seperti *Generalized Method of Moments* (GMM), untuk mengatasi potensi masalah *endogeneity* yang telah diuraikan sebagai

keterbatasan pada Bab III. Kelima, memperluas cakupan penelitian pada data lintas negara ASEAN untuk menguji konsistensi temuan pada konteks kelembagaan yang berbeda. Keenam, mempertimbangkan pengukuran manajemen laba alternatif, seperti Kothari Model atau Dechow-Dichev Model, sebagai pembanding terhadap Modified Jones Model yang digunakan dalam penelitian ini, mengingat hasil uji *robustness* pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian temuan bersifat sensitif terhadap pendekatan pengukuran manajemen laba yang digunakan.

